

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi. Salah satu perwujudan demokrasi diindonesialah dengan dilaksanakan pemilihan umum, Pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Pemilihan umum memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, partisipasi politik masyarakat menjadi bagian penting dalam konteks legitimasi dari sebuah pemerintahan yang demokrasi. Secara umum partisipasi politik masyarakat dapat dilihat pada pelaksanaan pemilihan umum. Robert Dahl seorang teoritis politik berpendapat bahwa pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern (Dahl, 1992: 33). Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Samosir, 2014).

Maka dari itu penelitian disini akan membahas serta menguraikan tentang pilpres tahun 2019 lalu, bagaimana para pendukung Joko Widodo- dan Ma'Ruf Amin dalam pemilihan umum pada tahun 2019 dengan membentuk salah sebuah kepentingan kelompok yaitu JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional).

Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai ideologi dengan politik dengan cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tiadanya dukungan massa rakyat yang luas. Jadi sebuah organisasi dapat diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.

Dengan itu, kelompok kepentingan yang berbentuk organisasi merupakan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam susunan politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, artikel ini akan membicarakan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membiaknya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik (Maiwan, 2016).

Peneliti disini akan memaparkan penjelasan tentang bagaimana manifestasi dukungan politik JKSN (jaringan kiai santri nasional) terhadap pasangan calon presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan tahun 2019. Mengingat kemenangan presiden periode tahun 2019- 2024 dengan dimenangkan oleh kandidat Jokowi dan pasangannya Ma'ruf Amin dengan kemenangan yang memiliki tingkat yang besar.

Hubungan Islam dan Negara, merupakan suatu bidang kajian yang sangat penting sebagai gejala sosial. Hubungan tersebut merupakan cermin agama Islam dalam masyarakat. Hubungan Islam dan Negara dalam penjelasan Gusdur dikatakan bahwa: "Islam tidak mengenal doktrin tentang negara. Dalam soal bentuk negara, menurutnya tidak mempunyai aturan baku. Hal ini bergantung negara bersangkutan apakah mau menggunakan model demokrasi, teokrasi atau monarki. Hal yang terpenting bagi Gusdur adalah terpenuhinya tiga kriteria, yaitu: pertama, mengedepankan prinsip-prinsip permusyawaratan. Kedua, ditegakkan keadilan. Ketiga, adanya jaminan kebebasan (al-huriyyah)."

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian ini karena hubungannya dengan Islam adalah dalam keputusan Jokowi dalam memilih seorang Kyai besar sekaligus orang yang tidak hanya senior namun memiliki jabatan tertinggi yaitu Ketua MUI. Dengan memilih Ma'ruf Jokowi telah memenangkan pertarungan politik sebelum proses pemilu itu sendiri berjalan. Jokowi telah mematahkan asumsi dan tuduhan kepadanya. Kubu lawan yang

selalu mendengungkan cinta ulama namun justru cawapresnya bukan ulama melainkan pengusaha (Silalahi, 2019).

JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) adalah salah satu yang berpengaruh dalam kemenangan presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. JKSN merupakan salah satu kelompok relawan beranggotakan kiai, nyai, santri, dan keluarga pondok pesantren se-Indonesia yang dalam pemilu presiden 2019 mengusung pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. JKSN ini sengaja dibentuk untuk membentuk jaringan yang pro Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01 tersebut. Dukungan terhadap presiden pasangan Joko Widodo-KH. Ma'ruf pada Pilpres tahun 2019 bertambah, karena setelah sukses pada Pilgub Jatim 2018, Gerbong Khofifah Indar Parawansah-Emil Dardak berkomitmen untuk mendukung Jokowi sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia (pos, 2019). Dukungan dari gerbong Khofifah Indar Parawansah-Emil Dardak diwujudkan dengan mendirikan sebuah organisasi yang disebut JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional), lalu ditunjuklah KH. Asep Saifudin Chalim sebagai Dewan Penasehat JKSN, Beliau mengatakan JKSN akan dibentuk secara nasional untuk memenangi calon presiden nomor urut 01 pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin melalui para jaringan ulama, kiai, santri, dan wali santri. Menurut kiai Asep yang juga selaku Pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto ini, JKSN membentuk pimpinan di sejumlah provinsi-provinsi besar di Indonesia dengan mendeklarasikan kira-kira 470 cabang.

Pemilihan Presiden Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi secara nasional di Indonesia. Dan untuk memenangkan pasangan calon Pilpres nomor urut 01 ini, maka Khofifah Indar Parawansah membentuk suatu organisasi JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) yang terdiri kira-kira 470 cabang di setiap provinsi, salah satunya provinsi Sumatera Selatan di ibu kota Palembang. Abah Yuris Al-Palimbani pimpinan pondok pesantren Tauhidil-Muchlisin adalah salah satu pengurus JKSN cabang Palembang (Al-Palimbani, 2021). Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) di Palembang telah menyatakan bawasan mereka siap ikut andil dalam memenangkan pasangan calon presiden Jokowi- Ma'ruf Amin pada pemilu 2019. (Darmayana, 2019).

Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah dukungan politik, dan pengaruh terhadap organisasi JKSN jika pasangan calon presiden Jokowi-ma'ruf Amin menang, Organisasi JKSN ini mendukung salah satu pasangan calon dari ke-2 calon presiden dan salah satunya adalah nomor urut 01. JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) sangat berpengaruh dalam memenangkan pasangan calon presiden Jokowi-ma'ruf Amin.

Dra. Hj Khofifah Indar Parawansah-Emil Dardak ini memanfaatkan kedudukannya sebagai Gubernur Jatim dan Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI untuk mengayomi para Kiai, Nyai, Santri, dan para wali untuk mendukung pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Khofifah membentuk organisasi ini karena memiliki hubungan yang baik dengan Jokowi dan pernah menjabat sebagai Menteri Sosial ketika kepemimpinan Presiden Jokowi pada

periode 2014-2018, sehingga ia menyatakan bawasan ia akan mendukung pasangan calon presiden nomor urut 01 ini.

Dalam proses berdemokrasi sudah seharusnya hak untuk memilih pemimpin ditentukan oleh para peserta pemilu itu sendiri dan dalam pemilihan presiden Jokowi-Ma'ruf Amin dibentuklah organisasi JKSN tersebut, untuk mengambil perhatian para rakyat dalam memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Cara kinerja organisasi JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) adalah dengan cara kampanye yang ditujukan kepada kiai, nyai, santri, dan para wali. Calon wakil presiden nomor urut 01 yaitu Ma'ruf Amin melanjutkan perjalanan politik dari kota Yogyakarta ke Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam kunjungan kali ini, Ma'ruf mempunyai target tertentu (Azhar, 2019). Para kiai dan santri di Sumatera Selatan dalam Jaringan Kiai-Santri Nasional (JKSN) menyatakan dukungan dan berjanji memenangkan pasangan calon presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, dalam kampanye KH Ma'ruf Amin menghadiri pernyataan dukungan generasi milenial dan kiai-santri serta bersilaturahmi dengan beberapa ulama di sejumlah pondok pesantren di Palembang (news, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana manifestasi dukungan politik JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) terhadap pasangan calon presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin dalam pemilihan tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

Untuk mengetahui bagaimana manifestasi kepentingan politik JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) dalam mengayomi para kiai, nyai, santri, dan para wali untuk memenangkan pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada setiap pembaca bentuk kekuatan politik dalam dalam organisasi kemasyarakatan terhadap pemilu
2. Menjadi bahan acuan terhadap pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang manifestasi ormas terhadap pemilu.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penyusunan skripsi ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sejalan dengan penelitian ini, sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Dalam jurnal komunikasi spektrum oleh Rudy Arisyanto yang berjudul "*Dukungan Politik Dan Jaringan Komunikasi Sosial*" mereka beranggapan bahwa dengan membangun kesepakatan dengan para pimpinan "formal" berbagai

organisasi sosial atau organisasi massa seperti parpol, keagamaan, kepemudaan dan sejenisnya sudah menganggap dirinya pasti memperoleh dukungan dari para anggota masing-masing organisasi “formal” tersebut. Maka dari itu, masalah “jumlah anggota” selalu menjadi tolak ukur utama untuk memutuskan organisasi mana yang harus didekati dan pertimbangan lainnya seperti tidak ada artinya. Akhirnya, seringkali kandidat kecewa pada organisasi atau pemimpin organisasi yang dianggapnya “punya massa” tadi, yang dalam kenyataannya tidaklah demikian (Agusyanto, 2011).

Dalam jurnal penelitian Ikhsan Darmawan Kelompok “kotak kosong” pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 merupakan kelompok yang ingin menyuarakan agar masyarakat Kabupaten Pati tidak lagi dipimpin oleh Bupati Pati petahana, Haryanto. Kelompok “kotak kosong” pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menamakan diri mereka dengan Aliansi Kawal Demokrasi Pilkada (AKDP) Kabupaten Pati. AKDP diketuai oleh Sutiyo dan dideklarasikan di rumah salah seorang mantan kepala desa di tempat deklarasi. Menurut Ketua AKDP, Sutiyo, “Kampanye kotak kosong ini sebagai pendidikan berdemokrasi, karena warga harus diberikan pilihan dan suara mereka juga berharga” (Safuan, 2016).

Selanjutnya jurnal penelitian adelia fitri, ada prinsipnya gagasan tentang representasi memiliki tiga komponen (Rozaki:2014). Pertama masyarakat yang diwakili yakni sekelompok orang yang terikat bersama-sama dalam sebuah wadah yang langsung dan konkrit berbasis suara, permintaan, dan tuntutan maupun dalam sebuah wadah yang tidak langsung serta abstrak

misalnya berbasis daerah, tradisi atau hal-hal yang baik. Kedua, wakil yaitu orang yang menjembatani serta menjaga kepentingan-kepentingan orang yang Representasi Kelompok Disabilitas dalam Pencalegan Tahun 2019 46 diwakili. Wakil ini juga berperan untuk memperjuangkan kepentingan orang yang diwakili dalam level institusi. Ketiga, tempat (locus) yakni daerah atau wilayah yang menjadi yurisdiksi dari praktik representasi. (Fitri, 2019).

Kemudian dalam jurnal Ilham Syahputra dan Ratih Baiduri Perpecahan kekuatan GAM dalam partai lokal Aceh terjadi menjelang Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012. Pada saat itu Partai Aceh tidak lagi bersedia mengusung Irwandi Yusuf menjadi calon Gubernur karena dianggap gagal menjalankan amanat Mou Helsinki dan terlalu lunak terhadap pemerintah pusat serta mengutamakan kepentingan kelompoknya. Karena hal itu Irwandi Yusuf sebagai Gubernur petahana memutuskan maju melalui jalur independen. Kondisi ini menyebabkan perpecahan kekuatan politik lokal menjadi dua kubu antara Irwandi Yusuf dan Partai Aceh yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf. Pihak-pihak yang memperbutkan kekuasaan sebagai Gubernur mulai melakukan manuver-manuver politiknya dan menimbulkan ketegangan ditengah masyarakat. Pengurus Partai Aceh yang memilih mendukung Irwandi Yusuf dikeluarkan dari struktur kepengurusan partai mulai dari Ketua DPC hingga juru bicara Partai Aceh di provinsi. Dalam proses Pilkada terjadi perdebatan menyangkut keberadaan calon independen. Partai Aceh menolak keras keberadaan calon independen dalam Pilkada Gubernur Aceh, namun Komisi Independen Pemilihan (KIP) tetap

mbolehkan keikutsertaan calon independen karena sesuai dengan UUPA. Kondisi ini membuat Partai Aceh memboikot pelaksanaan Pilkada tersebut. Hal ini mengindikasikan upaya menghalangi majunya Irwandi Yusuf sebagai calon independen (baiduri, 2018).

Selanjutnya jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom, Fungsi artikulasi kepentingan ini biasanya dilakukan oleh struktur yang disebut dengan Interest Group atau kelompok kepentingan. Contohnya: Di Inggris, Partai Konservatif harus bersaing dengan Partai Buruh dan Liberal dalam memperoleh dukungan dari berbagai kelompok kepentingan di negaranya. Dalam usaha memenangkan persaingan partai konservatif mengundang kelompokkelompok ekonomi, regional, atau lokal untuk menyatakan keinginan mereka dan untuk ikut mempengaruhi kebijaksanaan Partai Konservatif melalui kegiatankegiatan perkumpulan masyarakat dan konferensi tahunan partai dan dalam komite-komite Partai Konservatif yang ada dalam parlemen. Partai Konservatif bisa melakukan tawar-menawar dengan kelompok-kelompok kepentingan itu tetapi tidak bisa menguasainya (Unikom, 2018).

G. Kerangka Teori

1. Teori *interest group*

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali di defenisikan sebagai, *A group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests* (Benditt 1975:34). Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada

agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.

Teori kelompok kepentingan (*The Interest Group Theory*). Teori kelompok kepentingan menekankan adanya konflik dan negosiasi antar konstituen akuntansi di dalam proses penyusunan standar akuntansi. Pulo yang tergusur warga penghuni kalijodo persatuan pedagang rotan di Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni: Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan Demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Rawasari, dan sejenisnya. Kedua, kelompok nonasosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan

keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas social. Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Keempat, kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya (Maiwan, 2016).

2. Teori Pemilu

Pemilu sebagai sebuah mekanisme dalam berdemokrasi merupakan peristiwa penting, dimana rakyat kembali dimintai restu oleh politisi untuk menjadi 'wakilnya' di dalam pemerintahan. Di dalam Pemilu para Kandidat

dan Partai Politik bersaing untuk mendapatkan simpati pemilih. Persaingan ini, idealnya kemudian menjadi penentu dan berpengaruh terhadap pilihan kebijakan Pemerintah, karena Kandidat dan Partai akan menerapkan pilihan kebijakan yang sesuai dengan platform yang mereka bangun. Karena adanya persaingan di dalam pemilu di mana beberapa kandidat bersaing untuk mendapatkan posisi pada suatu lembaga pemerintahan, pemilu kemudian juga berdampak pada pilihan kebijakan yang akan dibuat oleh sebuah lembaga pemerintahan. Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar-benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya. Sebagai sebuah mekanisme, Pemilu kemudian diharapkan dilaksanakan secara bebas dan setara (free and fair), dimana sistem pemilu menjamin hak individu dan adanya sistem kontrol bagi manajemen pelaksanaan pemilu. Sukses dari pemilu kemudian ditentukan oleh penerimaan dari seluruh partisipan pemilu (partai politik dan kandidat) secara bulat (legitimate) dan mengikat (binding) (dahlan, 2010).

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk

bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara” (Praja, 2019).

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat. Secara universal pemilu adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakilwakil rakyat yang akan duduk dilembaga legislatif, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan: Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercemin dengan dilaksanakannya pemilihan umum dalam waktu-waktu tertentu. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Didalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu yaitu di bab VIIB Pasal 22E yaitu tentang Pemilihan Umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap

hak-hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambat pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara, Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi (Sarbaini, 2015)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Kirl dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Menurut Lincoln dan Guba, penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, antara lain yaitu:

- a. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti.

- b. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari.
- c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- d. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.

Dan dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan (Mulyana, 2010).

2. Lokasi penelitian

Lokasi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Pondok Pesantren Tauhidil Muchlisin, jalan lintas timur didesa suka pulih. Kecamatan pedamaran OKI berdasarkan terhadap rumusan masalah yang fokus dalam manifestasi JKSN terdapat calon Pilpres nomor urut 01.

3. Sumber Data

Sumber Data Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan Sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut. Data yang diperoleh melalui wawancara.

b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut (Tanzeh, 2011).

4. Teknik pengumpulan data

a. Metode Wawancara

Untuk lebih memperjelas pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Dalam wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan nara sumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Pada wawancara bebas sudah dilakukan sejak peneliti memasuki lapangan. Wawancara meliputi riwayat pertunjukan oleh seniman, riwayat seniman, konsep dalam berkesenian, ekspresi seni seniman. Pada wawancara bebas berguna untuk menjalin keakraban dan keterbukaan serta tujuan penelitian (Subandi, 2011). Dan objek wawancara di dalam penelitian ini adalah Abah Yuris Al-Palimbani.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu pada saat melakukan penelitian. Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia (Mulyana, 2010).

5. Teknik Analisa Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur ukuran data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan

penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Pengelolaan Analisis data yang digunakan peneliti adalah tehnik Langkah-langkah analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data mana yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas, memberi kode, selanjutnya mengelompokkan (mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada (Subandi, 2011).

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil tes, dan analisis hasil wawancara.

c. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data ini adalah menarik simpulan dan verifikasi. Simpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Kemudian dilakukan verifikasi data agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif (Subandi, 2011). Pada tahap

penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data-data hasil penafsiran.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penelitian ini secara keseluruhan, maka penulisan ini secara umum dibagi dalam lima bab antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metodologi penelitian.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori kepentingan kelompok, dan teori pemilu.

BAB III JARINGAN KIAI-SANTRI NASIONAL

Bab ini berisi tentang sejarah objek penelitian, visi dan misi, struktur organisasi objek penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dari lapangan yang telah ditinjau dilapangan, yang dimana mengetahui tentang manifestasi kepentingan politik JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) sumatera selatan terhadap pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian manifestasi kepentingan politik JKSN (Jaringan Kiai Santri Nasional) sumatera selatan

terhadap pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin pada pemilihan presiden Tahun 2019.